

TKI Purna dan Berbagai Program Reintegrasi di Indonesia



Palmira Bachtiar dan Dinar Dwi Prasetyo
Selasa, 15 Desember 2015

Latar Belakang

Migrasi pulang bukan fenomena baru di Indonesia. Tiap tahun ribuan pekerja migran pulang. Misalnya sebanyak 260.093 pada 2013, 201.779 pada 2014 (BNP2TKI, 2015).

Literatur yang membahas migrasi pulang dan kontribusinya pada pembangunan masih terbatas. Kontribusi migrasi masih dikaitkan remitansi. Padahal remitansi bukan satu-satunya.

Dalam konteks Indonesia, yang mayoritas pekerja migrannya low skilled, konsep migrasi pulang dan pembangunan seperti irelevan. Padahal banyak TKI yang sukses menjadi agen pembangunan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa low skilled migrant workers sangat rentan mendapat perlakuan tidak pantas dan pulang dengan masalah.

Dibutuhkan skema reintegrasi yang dapat menangani dengan baik pekerja migran sukses dan bermasalah.

Tujuan dan Metode Penelitian

Tujuan Penelitian

- Menjelaskan fenomena migrasi pulang di Indonesia berdasarkan literatur yang ada;
- Membangun kerangka konseptual program reintegrasi yang komprehensif, dan;
- Memetakan/mendokumentasikan program reintegrasi yang ada di Indonesia.

Metode Penelitian

- Studi literatur;
- Wawancara mendalam dengan penyelenggara program reintegrasi, dan;
- Catatan lapangan dari studi migrasi internasional sebelumnya.

Studi Literatur: Migrasi Pulang dalam Konteks Indonesia

New Economic Labor Migration:

Migrasi di Indonesia lebih merupakan keputusan keluarga sebagai respon dari kebutuhan keluarga. Sehingga, kepulangan migrasi diharapkan membawa keberhasilan.

Social network approach:

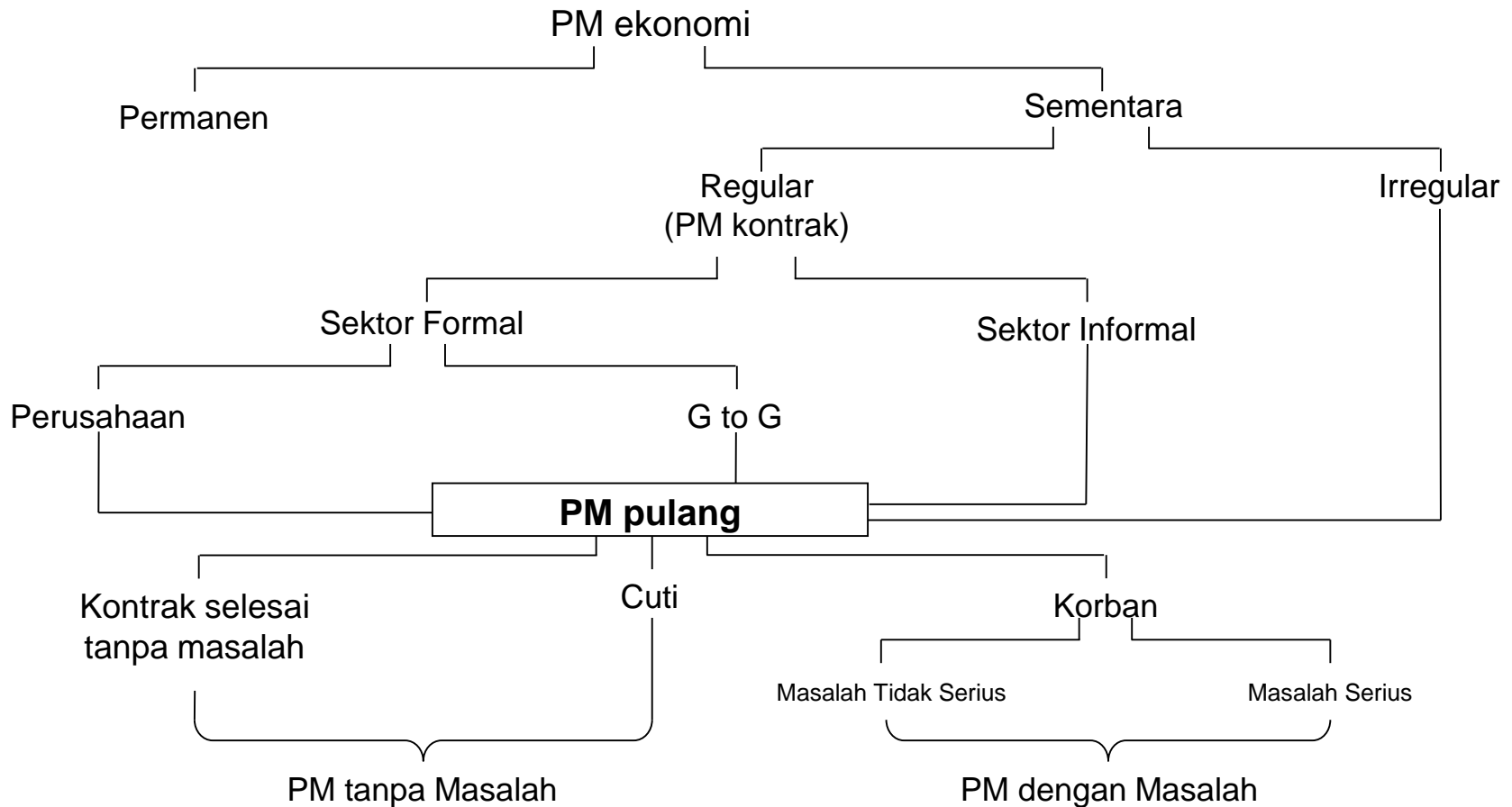
Migrasi membentuk jejaring. Meningkatnya kebutuhan pekerjaan di negara tujuan membuat kepulangan menjadi ajang rekrutmen.

Structural approach:

Migrasi tidak merubah nilai tradisional dan budaya patriarki sehingga sulit menjadi agen perubahan.

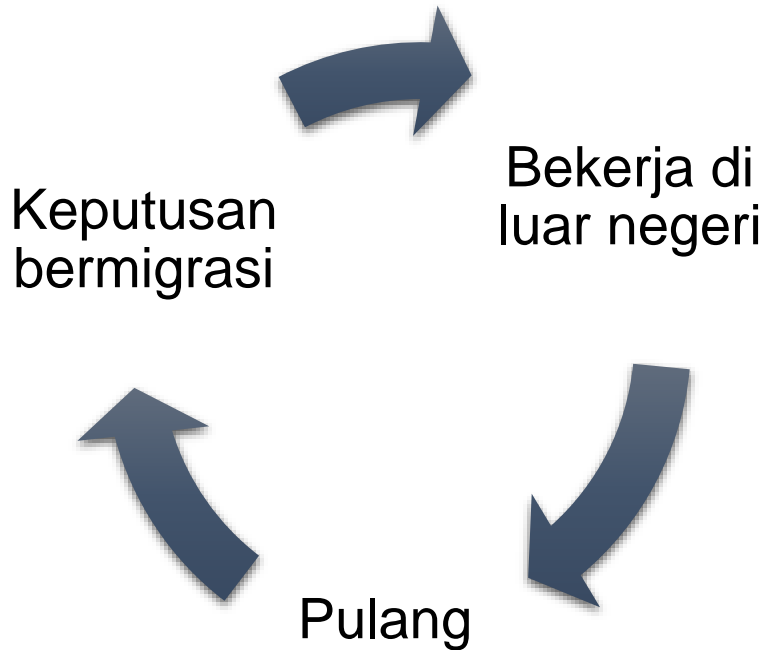
Orientasi migrasi masih pada aspek materi, bukan pendidikan sehingga migrasi menjadi solusi tunggal perbaikan ekonomi. Akhirnya terjadi migrasi sirkular.

Kerangka Migrasi dan Migrasi Pulang di Indonesia



Migrasi Sirkular: Tanpa dan Dengan Program Reintegrasi

TANPA PROGRAM REINTEGRASI



DENGAN PROGRAM REINTEGRASI



Pentingnya Program Reintegrasi bagi TKI Purna

TKI purna membawa uang remitansi yang besar ketika pulang (terutama dari Asia Timur).

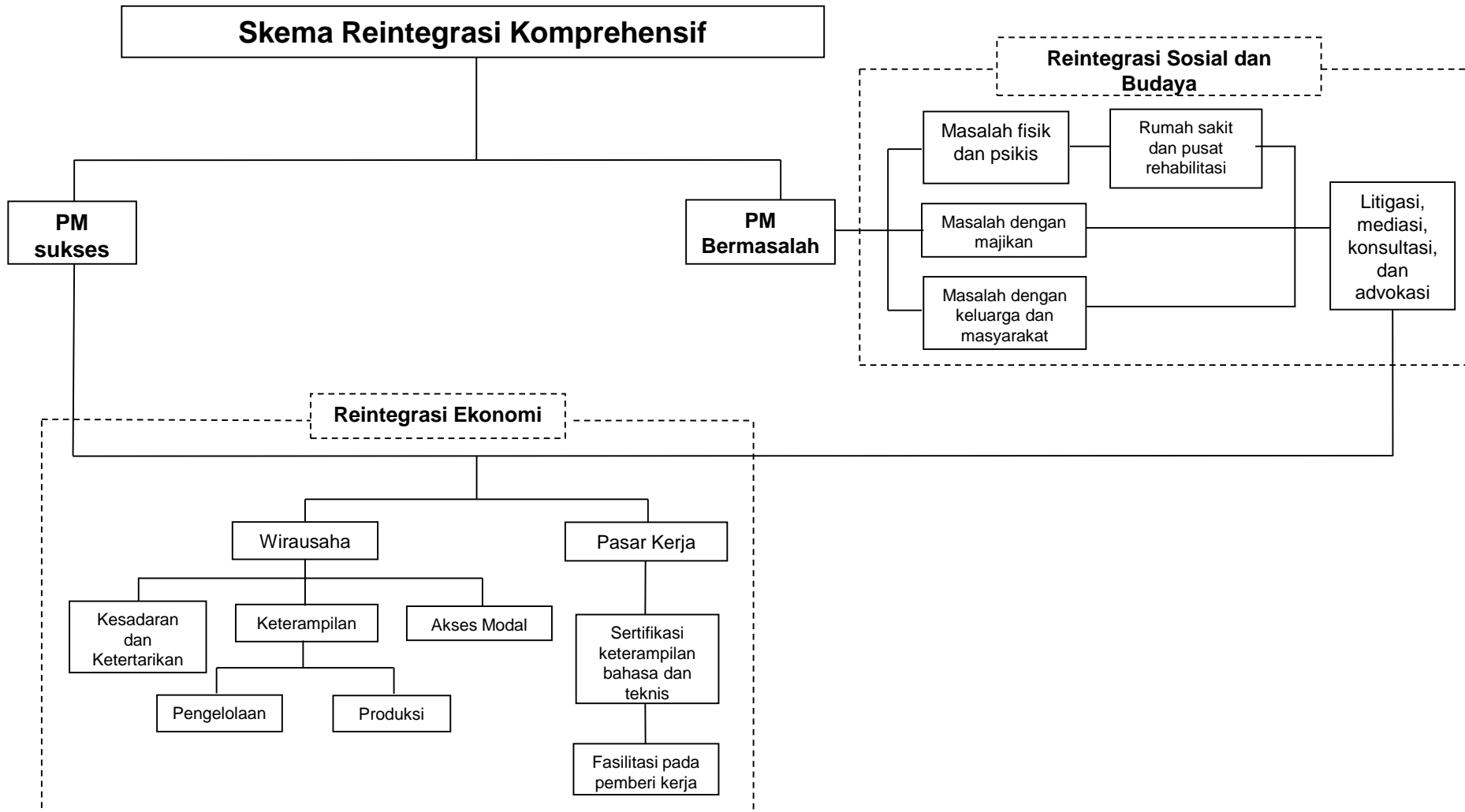
TKI mengalami masalah fisik, psikis, maupun ekonomi karena eksploitasi.

TKI purna memiliki keterampilan baru seperti bahasa dan budaya kerja baru.

Migrasi sirkular akan menimbulkan kerentanan terhadap kehidupan keluarga, terutama pertumbuhan anak

Program reintegrasi membantu, baik TKI yang sukses maupun TKI yang bermasalah menyelesaikan masalahnya dan akan memberi pilihan lain selain bermigrasi.

Skema Program Reintegrasi yang Komprehensif



Program-Program Reintegrasi TKI Purna yang Ada di Indonesia

Program atau kegiatan reintegrasi yang ada masih tersebar di berbagai lembaga, baik pemerintah, NGO, dan lembaga donor dan mereka juga seringkali melakukan kerjasama.

Sebagian besar stakeholder pelaksana mengerti fenomena migrasi sirkular sehingga reintegrasi menyasar bukan hanya TKI Purna, tetapi juga calon TKI, keluarga, dan komunitasnya.

Ada beberapa program yang berkonsentrasi lebih dari satu aspek reintegrasi.

Sebagian besar program melakukan reintegrasi dalam bidang ekonomi, terutama dalam lingkup pelatihan wirausaha.

Reintegrasi dalam bidang sosial dan budaya sebagian besar dilakukan dalam bentuk preventif, terutama melalui penguatan kapasitas masyarakat di kantong pekerja migran.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI)

Program

- Pemberdayaan TKI purna yang terdiri dari (i) kegiatan edukasi perbankan dalam rangka pemanfaatan remitansi untuk kegiatan produktif, (ii) bimbingan teknis kewirausahaan, dan (iii) pengembangan kampung/sentra usaha TKI Purna.

Tujuan

- TKI purna, calon TKI, dan keluarganya bisa mengelola remitansi melalui kegiatan produktif, dan;
- pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat di kantong buruh migran.

Cakupan

- Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Riau Kepulauan, Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTB, NTT, Bali, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Lampung.

Kementerian Sosial

Program

- Pemulangan pekerja migran bermasalah (PMB) domestik maupun lintas negara dari titik debarkasi sampai ke daerah (provinsi) asal; termasuk (i) Program RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center); (ii) Program UEP (Usaha Ekonomi Produktif).

Tujuan

- Memberi perlindungan dan layanan psikososial bagi korban kekerasan dan reintegrasi.

Cakupan

- Kementerian Sosial memiliki 2 RPTC yang terletak di Jakarta dan Tanjung Pinang. Sementara itu, di 28 propinsi lain juga terdapat RPTC yang dijalankan melalui skema program rehabilitasi psikososial yang dananya disalurkan melalui dana dekonsentrasi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program

- Bina Keluarga TKI melalui:
 - Pemberdayaan ekonomi;
 - Pembinaan ketahanan keluarga, dan;
 - Pembinaan pola asuh anak.

Tujuan

- Keluarga TKI dapat menjadi keluarga yang mandiri secara ekonomi
- Mengurangi resiko terjadinya masalah keluarga akibat salah satu anggota keluarga atau kepala keluarganya menjadi TKI, dan;
- Menjaga agar hak-hak anak, seperti pendidikan dan asupan yang bergizi dalam keluarga TKI dapat tetap terpenuhi.

Cakupan

- Sejak tahun 2010, sudah dilaksanakan di 22 kabupaten/kota dari sekitar 140 kabupaten/kota kantong pengiriman TKI yang ada di Indonesia.

Kementerian Tenaga Kerja

Program

- Program pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana (TKS), Padat Karya Produktif (PPP), Wirausaha Baru (WUB), dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Tujuan

- Menciptakan pelaku usaha baru yang dapat menciptakan kesempatan kerja mandiri, dan lapangan kerja baru.

Cakupan

- Program ini ada di seluruh wilayah Indonesia termasuk di kantong buruh migran. Sasarannya penganggur dan setengah penganggur, serta pemilik usaha kecil.

Komnas Perempuan

Program

- Dukungan administratif merujuk TKI kepada kementerian terkait;
- Advokasi perbaikan kebijakan pemerintah, dan;
- Penanganan TKI bermasalah pasca direpatriasi yang meliputi konseling, bantuan hukum, pelayanan kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, penanganan trauma, reintegrasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

Tujuan

- Menyediakan mekanisme pemulihan, penanganan kasus dan pendampingan bagi TKI yang bermasalah.

Cakupan

- Kegiatan temporal mencakup seluruh Indonesia, namun Program Pengembangan Sistem Pemulihan bagi Pekerja Migran, sejak 2011-2014, dilaksanakan hanya di Timor Tengah Selatan yang dinilai memiliki masalah serius dalam pelanggaran HAM TKI perempuan.

Solidaritas Perempuan

Program

- Pengorganisasian masyarakat;
- Advokasi perbaikan regulasi pemerintah;
- Kampanye penyadaran dan penggalangan dukungan publik, dan;
- Penguatan dan bantuan hukum TKI untuk memperoleh hak-hak yang terenggut.

Tujuan

- Membantu TKI perempuan menghadapi kerentanan dari migrasi yang tidak aman, perdagangan manusia serta HIV AIDS, dan;
- Mendorong munculnya pemimpin buruh migran yang aktif mendorong perlindungan buruh migran.

Cakupan

- Seluruh Indonesia, namun SP biasanya memanfaatkan perpanjangan tangannya di daerah (komunitas).

Center for Indonesia Migrant Workers (CIMW)

Program

- Pelatihan paralegal;
- Pelatihan HIV AIDS dan Human Trafficking;
- Pelatihan usaha produktif, dan;
- Advokasi: *crisis center* dengan *trauma healing* (konseling) dan pendampingan hukum kepada TKI yang bermasalah.

Tujuan

- Membantu TKI mengatasi masalah mereka secara mandiri, serta mengorganisir diri untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan mereka.

Cakupan

- Ponorogo, Madiun, Blitar, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Batubara, Deli Serdang, Percut (Sumut).

Program

- Program pelatihan gratis selama enam minggu bagi TKI purna Korea. Di akhir pelatihan diadakan *job fair* dari sekitar 30 perusahaan Korea di Indonesia.

Tujuan

- Membantu TKI purna dari Korea (tanpa masalah) untuk bekerja pada perusahaan Korea di Indonesia.

Cakupan

- Tidak membatasi wilayah asal TKI purna, asalkan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, TKI purna Korea dari seluruh wilayah Indonesia bisa mengikuti program ini.

Yayasan TIFA

Program

- Penanggulangan Kemiskinan Melalui Migrasi Aman (2012 – 2014), dan;
- Pemberdayaan Buruh migran dan keluarganya di daerah asal pada 2010 – 2013. Program dilakukan melalui pembentukan CBO (*Community Based Organization*).

Tujuan

- Membangun daya kritis dan keaktifan masyarakat dalam kelompok untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara, dan;
- Mengatasi kesenjangan hukum yang terjadi di Indonesia dengan mendekatkan perlindungan langsung kepada masyarakat di tingkat desa.

Cakupan

- Lombok Timur, Mataram, Flores, Kupang, dan Atambua, Cilacap, Indramayu, dan Banyuwangi

International Labor Organization

Program

- Advokasi dan pendampingan perbaikan kebijakan;
- Kampanye global ratifikasi nasional Konvensi ILO, dan;
- Peningkatan kapasitas melalui financial literacy bagi TKI, TKI purna, dan keluarganya.

Tujuan

- Memerangi diskriminasi dan eksploitasi terhadap TKI, terutama pembantu rumah tangga;
- Mempromosikan pemberdayaan dan perlindungan TKI, dan;
- Membantu upaya pemerintah memperkuat perlindungan bagi TKI.

Cakupan

- Seluruh wilayah Indonesia, namun, ada beberapa daerah yang telah dijadikan lokus kerja ILO, di antaranya, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur

International Organization for Migration

Program

- Memfasilitasi pengikutsertaan korban perdagangan manusia dalam pendidikan formal dan informal;
- Income generating, dan;
- Kegiatan pelatihan keterampilan.

Tujuan

- TKI korban mendapatkan hak-hak pendidikan setara, menjadi mandiri secara ekonomi dan memiliki keterampilan di bidang yang diminatinya.

Cakupan

- Program dan kegiatan yang dilakukan oleh IOM menysasar seluruh Indonesia tanpa ada batasan wilayah tertentu. Namun program paling banyak dilakukakan di daerah Jawa, Sumatera, NTT, dan NTB.

Kesimpulan dan Relevansi Kebijakan

Tidak ada “*one-size-fits-all theory*” yang mampu menjelaskan fenomena migrasi pulang di Indonesia.

Migrasi sirkular sebagai tantangan bagi program reintegrasi untuk memutusnya.

Program reintegrasi di Indonesia sudah banyak dilakukan namun sifatnya masih sporadis, tidak reguler, dan *demand based*.

Strategi reintegrasi harus dimasukkan/dipertimbangkan dalam kerangka kebijakan, terutama revisi UU No. 39 Tahun 2004.

Reintegrasi menyeluruh (ekonomi, sosial, budaya) juga dilakukan kepada keluarga dan komunitas. Perlu diperkenalkan sebelum keberangkatan.

TERIMA KASIH
ATAS PERHATIAN
BAPAK/IBU SEKALIAN

Masukan, kritik,
dan saran akan
sangat kami
hargai

www.smeru.or.id

 @SMERUInstitute

 The SMERU Research
Institute

